

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Manusia sering juga disebut sebagai makhluk sosial, manusia sangat memerlukan bantuan dari orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, teman atau orang lain di sekitarnya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu kelebihan dan kekurangannya manusia dapat saling melengkapi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan individu, kelompok, dan nasional.

Aspek sosial yang dibicarakan adalah tentang bagaimana suatu individu atau kelompok berinteraksi untuk membuat perubahan, perbaikan, atau ancaman terhadap sesuatu tergantung pada kepentingan apa yang akan menjadi tujuan utama. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kerja sama baik antarindividu maupun antarkelompok. Ini akan berdampak pada semua orang yang terlibat. Dengan menggunakan konsep ini, sebuah negara sama dengan manusia yang sangat amat memerlukan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan dalam negeri ataupun kebutuhan lainnya seperti politik, ekonomi, budaya, sosial dan lain-lainnya termasuk kerjasama atau diplomasi antar negara untuk mencapai ke tujuan yang sama.

Istilah hubungan internasional yaitu hubungan antar negara, yang dimana negara menjadi aktor utamanya. Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antar aktor global, yang meliputi, organisasi internasional, dan aktor non-negara, dalam konteks politik, ekonomi, keamanan, dan budaya (Burchill, 1996).

Hubungan internasional itu sendiri menggunakan sistem internasional yang dimana pemerannya terdiri dari aktor-aktor yang berbeda-beda, yang masing-masing memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda dan yang berusaha untuk memperoleh keuntungan atas keputusan-keputusan yang diambil oleh aktor-aktor lain (Waltz K. N., 1979). Hubungan internasional adalah suatu bidang yang mempelajari interaksi lintas batas antara aktor dan kepentingan negara. Negara berdaulat harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang tidak dipenuhi oleh negaranya sendiri. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam politik. Sebuah negara membutuhkan negara lain untuk membantunya dalam menangani masalah sehingga terjadi interaksi yang saling menguntungkan dengan memberikan bantuan materil dan immaterial sangat penting dalam bidang politik. Hubungan internasional terus berkembang, baik dalam hal teknologi maupun peradaban, sehingga kondisi lingkungan antar negara sangat dipengaruhi oleh hal ini. Menurut Kenneth N. Waltz, Hubungan Internasional adalah usaha untuk menjelaskan, mencegah, atau memecahkan konflik internasional serta mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang negara-negara di dunia dan interaksi mereka (Waltz K. N., 1979).

Ilmu Hubungan Internasional sering disebut sebagai ilmu yang bersifat multidisipliner karena berasal dari berbagai cabang keilmuan yang saling bersinggungan langsung dengan bidang keilmuan lainnya. Hal ini menjadikan Ilmu Hubungan Internasional bersifat dinamis dan fleksibel. Fokus kajian, metode yang digunakan, serta teori yang diterapkan dapat bergeser dan berubah sesuai dengan kebutuhan yang sejalan dengan fenomena dan kondisi dunia secara internasional pada waktu tertentu.

Salah satu bahasan yang paling bertahan lama dalam hubungan internasional adalah keseimbangan kekuatan. Konsep keseimbangan kekuatan sudah ada sejak zaman Yunani kuno, tetapi telah menjadi pusat dari teori hubungan internasional modern sejak Perdamaian Westphalia pada tahun 1648 yang dimana perjanjian tersebut berisi pemisahan kekuasaan gereja dari politik dan memberi wewenang kepada nationstate (negara bangsa) untuk menjalani kekuasaannya sesuai dengan batasan tertentu (Hadiwinata, 2017). Keseimbangan kekuatan mengacu pada bagaimana sumber daya militer, ekonomi, dan diplomasi terdistribusi di antara negara-negara, serta cara negara-negara tersebut menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan mereka. Para ahli telah terlibat dalam perdebatan mengenai efektivitas strategi keseimbangan kekuatan. Sebagian berpendapat bahwa strategi ini membantu mencegah konflik dan menjaga stabilitas, sementara yang lain beranggapan bahwa strategi ini justru dapat memicu perlombaan senjata dan meningkatkan ketegangan antarnegara.

Interaksi antar negara yang menjadi alasan utama dalam konsep hubungan internasional dimana interaksi yang dilakukan berdasarkan kepada suatu

kepentingan yang sudah menjadi prioritas di suatu negara terkait dengan hal tersebut, Hubungan Internasional merupakan suatu studi tentang hubungan antarnegara dan cara mereka berinteraksi satu sama lain dalam sistem internasional yang anarkis (Waltz K. N., 1979). Definisi tersebut memberikan pemahaman tentang sistem internasional yang bersifat anarkis, di mana menjadi pondasi utama terjadinya hubungan internasional dalam kondisi sistem internasional yang anarkis. Dengan kondisi demikian, negara memiliki pilihan untuk bekerjasama, bersekutu, maupun bersaing dengan negara lain. Hal ini menjadi latar belakang terjadinya pergeseran nilai masyarakat pada masa Perang Dunia I dan II, mulai dari sistem politik, budaya, ekonomi, maupun militer dalam bidang keamanan. Oleh karena itu, keilmuan hubungan internasional muncul untuk memetakan dan memahami pola interaksi antarnegara, serta mengevaluasi perilaku suatu negara dari sudut pandang internasional atau lintas batas negara.

Hubungan internasional merupakan studi tentang suatu persaingan hingga konflik antarnegara didalamnya yang berusaha untuk memberi kepastian tentang keamanan untuk kepentingan nasional mereka (Morgenthau, 1948). Definisi tersebut memberikan pemahaman tentang kepentingan sebuah negara dapat menimbulkan persaingan hingga konflik karena tidak selalu tujuan atau kepentingan sebuah negara dapat diterima oleh negara lain begitu saja.

Hubungan Internasional merupakan studi yang mempelajari tentang unsur-unsur yang ingin dicapai, yaitu kepentingan nasional. Hal ini dilakukan dengan menggunakan cara kerjasama untuk menciptakan atau meraih tujuan yang sama, baik oleh suatu negara maupun dalam hubungannya dengan negara lain. Selain itu,

Hubungan Internasional juga menggunakan cara persaingan untuk memperebutkan sumber daya alam, kekuasaan atau dominasi, wilayah, serta hal-hal yang berkaitan dengan politik, terutama di bidang ekonomi dan militer. Berbagai cara tersebut secara tidak langsung dapat memicu konflik, baik antarnegara maupun pada tingkat kawasan, sehingga terbentuk blok negara yang sepaham serta dibentuknya organisasi internasional atau komunitas kawasan seperti ASEAN. Komunitas kawasan tersebut berfokus pada tujuan pembangunan di berbagai bidang bagi negara-negara anggota di Asia Tenggara.

### **2.1.2 Organisasi Internasional**

Setiap negara yang pastinya memiliki suatu persamaan geografis ataupun kepentingannya yang memerlukan perkumpulan yang terintegrasi yaitu organisasi internasional. Yang dimana perkumpulan tersebut terdapat ideologi, dan tujuan yang sama dari berbagai aspek baik di dalam politik, ekonomi, budaya dan lainnya. Di dalam perkumpulan tersebut terdiri dari negara-negara yang saling membentuk tujuan untuk mengatasi berbagai macam masalah yang sedang terjadi sekarang hingga yang akan datang.

Menurut Rudy dalam Administrasi dan Organisasi Internasional tahun 1993 menyatakan bahwa organisasi internasional adalah sebuah pola interaksi dalam kerjasama dengan batas negara yang dilintasi, dengan dasar organisasi yang terstruktur dengan jelas yang diharapkan untuk keberlangsungan pelaksanaan fungsi yang sejalan serta diusahakan agar tercapainya tujuan yang sudah disepakati Bersama, baik dengan pemerintah maupun non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 1993).

Ada beberapa tujuan umum di dalam terbentuknya organisasi internasional, Adapun tujuan tersebut antara lain :

1. Untuk memperkuat pengaturan dalam hubungan internasional melalui proses dan teknik penyelesaian masalah antarnegara secara damai. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan potensi terjadinya perang atau konflik dalam skala internasional dengan cara mengendalikannya.
2. Mengutamakan kemajuan pada aktivitas kerjasama hingga pembangunan antarnegara yang didasari oleh keuntungan atau tujuan yang ingin dicapai, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi di suatu kawasan hingga mencakup lingkup kemanusiaan secara luas.
3. Pembangunan sistem pertahanan secara bersama dengan beberapa negara dalam konteks untuk mengantisipasi adanya potensi ancaman luar yang mengancam masing-masing negara (Coulombis & Wolfe, 1990, p. 276).

### **2.1.3 Kerjasama Internasional**

Setiap negara akan selalu memerlukan negara lain untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka kerjasama internasional adalah jawaban yang tepat untuk hal ini. Cakupan dari sebuah kerjasama internasional sangatlah luas dalam berbagai bidang diantaranya, politik, ekonomi, sosial hingga keamanan. Tujuan dari semua itu adalah untuk membuat keadaan interaksi dalam hubungan yang saling menguntungkan baik dalam tingkat negara atau organisasi, memperkenalkan cara perdamaian bagi semua pihak yang mempunyai keterlibatan atau kebutuhan.

Menurut Coulombis dan rekan nya Wolfe, kerjasama internasional adalah hubungan internasional yang berbentuk interaksi antar warga negara dengan warga di negara lainnya. Dengan demikian hubungan internasional dilakukan melalui antarnegara yaitu sebuah pion politik dengan teritorial yang sudah didefinisikan, populasi, serta otonomi daerah dengan secara efisien dan efektif dalam control wilayah beserta penghuni tanpa memperhatikan homogenitas etnis (Coulombis & Wolfe, 1990, p. 15)

Holsti menjelaskan beberapa sebab mengapa negara melaksanakan kerjasama internasional dengan negara lain diantaranya yaitu :

1. Peningkatan Kesejahteraan adalah salah satu alasan terjadinya kerjasama internasional untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menjalin kerjasama, pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih terjamin. Kerjasama juga dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung suatu negara dalam memproduksi barang kebutuhan negaranya karena adanya keterbatasan yang dimiliki.
2. Efisiensi, di dalam kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi, pengurangan biaya dalam pemenuhan kebutuhan menjadi salah satu alasan negara menjalin kerjasama dengan negara lain yang memiliki keperluan yang sama. Oleh karena itu, efisiensi menjadi unsur penyebab adanya kerjasama internasional.
3. Ancaman Keamanan, dengan munculnya masalah yang menjadi ancaman bagi beberapa negara yang berdekatan atau memiliki kepentingan yang

sama mendorong kerjasama internasional antarnegara untuk memperkuat keamanan dan stabilitas negara dari semua potensi ancaman.

4. Meminimalisir Kerugian Individual dan Negara, dengan adanya kerjasama internasional untuk mengurangi kerugian atau permasalahan yang disebabkan oleh tindakan individual suatu negara yang berpengaruh terhadap negara lain (Holsti, 1995, pp. 159-160)

Dalam buku berjudul “Theory and International System” tahun 1966 karya dari Charles Armor McClelland, Kerjasama Internasional adalah segala macam bentuk interaksi antara manusia dalam suatu masyarakat melalui atau bersama dengan negara nya dengan negara lain dan baik dalam prosesnya dilakukan oleh pemerintah maupun individu yaitu warga negara (McClelland, 1966, pp. 4-5)

#### **2.1.4 Keamanan Internasional**

Salah satu konsep dalam Hubungan Internasional adalah keamanan. Karena unit utama hubungan internasional adalah negara, maka bidang Studi Keamanan Internasional dibentuk di sekitar keamanan negara. Bahwa negara berusaha untuk menjadi aman, dan bahwa keamanan tidak hanya melibatkan integritas teritorial, tetapi juga perlindungan terhadap seperangkat nilai politik dan budaya tertentu. Namun, jika ada kesepakatan bahwa negara-negara mencari keamanan, tidak ada tidak ada konsensus tentang apa implikasi dari hal ini terhadap perang dan konflik (Buzan & Hansen, 2007).

Keamanan merupakan sebuah konsep yang berhubungan dengan beberapa aspek dalam kehidupan manusia, bukan hanya tentang militer, namun juga



berhubungan dengan politik, ekonomi, hingga sosial. Buzan menggolongkan keamanan ke dalam lima dimensi, yaitu :

- a. Dimensi militer, yang tidak hanya mengacu kepada pembangunan ketakutan militer baik konvensional maupun nuklir namun meliputi pula pengembangan kemampuan personil militer dan doktrin-doktrin kemiliteran.
- b. Dimensi politik, yang merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh negara untuk menjaga dan mempertahankan kesinambungan proses politik, ideologi dan sistem pemerintahan.
- c. Dimensi ekonomi, yang merujuk pada upaya-upaya melindungi sumber-sumber ekonomi dan kesejahteraan yang dimiliki negara.
- d. Dimensi sosial, yang mengacu pada kemampuan untuk melindungi nilai-nilai budaya bangsa
- e. Dimensi lingkungan, yang merujuk pada upaya-upaya untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusia (Buzan, 1991, pp. 117-134)

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa konsep keamanan terikat dengan aspek ancaman. Dimana negara yang melakukan mempersiapkan keamanan negaranya, karena negara bersangkutan mendapatkan ancaman dari negara lain.

### **2.1.5 Keamanan Siber (*Cybersecurity*)**

Keamanan siber atau (*Cybersecurity*) adalah keamanan terhadap perlindungan jaringan, sistem, data digital di dalam lingkup siber. Keamanan siber mencakup hal-hal tentang keamanan, tindakan, kebijakan serta resiko. Perlindungan tersebut mulai dari individu, perusahaan hingga negara. Munculnya

keamanan siber karena adanya ancaman dari luar di dalam lingkup siber yang melakukan penyusupan, perusakan, penyusupan data secara *illegal* yang bias disebut sebagai Serangan siber (*Cyberattack*).

Konsep cyber security merujuk kepada persepsi ancaman yang dihadapi mengingat aktivitas yang terhubung melalui internet adalah borderless, namun ketika arus informasi dengan cepat maka tidak terhindarkan ancaman terhadapnya dengan semakin kompleksnya berbagai aktor yang terlibat dalam aktivitas yang terkoneksi melalui internet (Putri, 2022)

Di dalam bukunya “Mengenal Studi Hubungan Internasional” (2022) Sylvia Octa Putri juga menyebutkan terdapat empat ancaman utama dalam Keamanan Siber (*Cybersecurity*) yaitu, spionase, kejahatan siber, perang siber dan terorisme siber yang menimbulkan ancaman yang sangat serius terhadap keamanan nasional hingga internasional. Ancaman-ancaman ini disebabkan karena adanya kelemahan di dalam desain internet, kelemahan di dalam perangkat keras dan lunak dalam penempatan sistem yang disebut sebagai “*more critical*” dalam dunia maya atau *virtual*.

#### **2.1.5.1 Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)**

Andi Hamzah mendefinisikan kejahatan siber (*cyber crime*) sebagai kejahatan pada bidang komputer secara umum dapat didefinisikan sebagai penggunaan komputer secara illegal. (Marsita & Hamzah, 1992).

Kejahatan siber digunakan dalam teks ini untuk merujuk pada setiap kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan, termasuk kejahatan yang tidak

terlalu bergantung pada komputer. Ia mengategorikan kejahatan siber dalam empat kategori, yaitu :

1. Komputer dapat menjadi objek kejahatan.
2. Komputer dapat menjadi subjek kejahatan.
3. Komputer dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan atau merencanakan kejahatan.
4. Simbol dari komputer itu sendiri dapat digunakan untuk mengintimidasi atau menipu. (Casey, 2011)

Kejahatan siber (*cyber crime*) sangat berhubungan erat dengan teknologi berbasis komputer dan jaringan. Kejahatan siber (*cyber crime*) dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis :

1. *Unauthorized Access to Computer System*, merupakan tindak kejahatan ketika seseorang menerobos sistem jaringan komputer secara ilegal tanpa izin dari pemilik sistem. Pelaku disebut hacker. Hacker dapat melakukan sabotase atau mencuri informasi rahasia, meskipun ada juga yang melakukannya tanpa tujuan jelas. Tindakan ini dimungkinkan karena adanya internet.
2. *Illegal Content*, merupakan jenis kejahatan ketika seseorang mengunggah informasi atau data ke internet yang salah, tidak etis, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya berita palsu, konten pornografi, atau pengungkapan informasi rahasia negara yang melawan pemerintah.

3. *Data Forgery*, adalah kejahatan ketika seseorang memalsukan data pada dokumen penting melalui internet. Pelaku biasanya menggunakan data pribadi korban untuk keuntungan pribadi.
4. *Cyber Espionage*, yaitu kejahatan ketika seseorang melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain melalui jaringan internet dengan cara menerobos sistem komputer lawan.
5. *Cyber Sabotage and Extortion*, merupakan jenis kejahatan ketika seseorang melakukan perusakan, penjejalanan, atau penghancuran pada sistem jaringan komputer yang terhubung internet. Biasanya dilakukan dengan menyusupkan malware sehingga sistem jaringan terganggu.
6. *Offense against Intellectual Property*, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk merugikan hak atas kekayaan intelektual pihak lain.
7. *Infringements of Privacy*, merupakan jenis kejahatan dengan mengambil data pribadi seseorang yang tersimpan secara terkomputerisasi. Tindakan ini dapat merugikan korban secara materi maupun non-materi (Golose, 2006).

#### **2.1.5.2 Serangan Siber (*Cyber Attack*)**

Di zaman ini manusia sangat amat bergantung pada teknologi informasi (TI). Teknologi informasi berkembang secara pesat, banyak sisi positif dari berkembangnya teknologi informasi ini tapi kita tidak bias melupakan dari sisi negatifnya yang sangat berbahaya yaitu, ancaman yang semakin meningkat juga di dunia teknologi informasi. Ancaman siber dapat mempengaruhi keamanan nasional hingga internasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami

keamanan siber karena merupakan isu yang sangat serius yang harus dihadapi oleh semua negara dan organisasi. Berbagai upaya juga harus di kembangkan seperti kebijakan dan praktik yang memadai untuk menangani ancaman siber atau serangan siber (*cyber attack*) ini.

Keberadaan manusia dalam dunia teknologi dan siber memiliki peran yang sangat penting. Ancaman serangan siber dapat bersumber dari berbagai pihak dengan cakupan yang luas, mulai dari peretas individu, perusahaan kriminal, kelompok teroris, korporasi, hingga negara-bangsa. Semua jenis penyerang tersebut berpotensi melakukan tindakan berbahaya dalam dunia maya. Terdapat dua klasifikasi penyerang dalam serangan siber, yaitu aktor negara dan aktor non-negara. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa ancaman serangan siber dapat berasal dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi ancaman serangan siber dari berbagai jenis penyerang, baik negara maupun non-negara (Lukasik, Goodman, & Longhurst, 2003).

### **2.1.6 Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional merupakan aspirasi dan sasaran suatu negara, meliputi aspek ekonomi, militer, maupun budaya. Dalam pandangan utama studi hubungan internasional, konsep ini dianggap fundamental sebagai landasan negara dalam menjalin hubungan internasional. Negara diyakini berasal dari tatanan ilahi dan terikat pada kebutuhan spesifiknya sendiri, yang disebut kepentingan nasional. Konsep ini sangat berkaitan erat dengan kekuatan negara, baik sebagai tujuan maupun alat, terutama dalam bentuk kekuatan keras (*hard power*) yang bersifat

destruktif. Ketika kepentingan nasional bertujuan untuk mengejar kekuatan, dan kekuatan digunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, maka dalam sistem internasional yang dipandang anarkis (kecuali kekuasaan negara itu sendiri), konsekuensinya adalah persaingan, munculnya keseimbangan kekuatan, konflik, dan perang (Bainus & Rachman, 2018).

Dalam konteks kepentingan nasional, terdapat dua kategori utama yang perlu dibedakan : kepentingan nasional vital atau esensial, dan kepentingan nasional non-vital atau sekunder. Kepentingan vital mengacu pada hal-hal yang sangat krusial dan mendesak bagi suatu negara, sehingga memerlukan pengambilan keputusan yang cepat, terutama dalam situasi darurat. Di sisi lain, kepentingan non-vital melibatkan proses yang lebih panjang dan tidak mendesak. Meskipun hasil dan manfaatnya mungkin tidak segera terlihat, kepentingan non-vital ini dapat memberikan dampak positif yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang (Jemadu, 2008).

Kepentingan nasional adalah tujuan yang ingin dicapai terkait dengan cita-cita tertentu. Dalam konteks ini, kepentingan nasional yang relatif serupa di semua negara atau bangsa meliputi keamanan (termasuk kelangsungan hidup rakyat dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan. Kepentingan nasional ini menjadi dasar dalam merumuskan atau menetapkan prioritas bagi setiap negara (Rudy, 2002).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Keamanan siber telah menjadi salah satu isu penting di dalam kajian studi ilmu hubungan internasional karena melihat dari dampaknya yang sangat luas dan berbahaya dimana dapat menyerang kapan saja. Hal ini berbanding lurus dengan

meningkatnya interaksi antarnegara di dunia maya yang menjadi semakin umum. Dengan adanya dunia maya memberikan kemudahan dalam proses terjadinya hubungan internasional, tetapi hal ini juga dapat memunculkan berbagai macam potensi masalah yang akan ditangani melalui keamanan siber.

Keamanan siber memiliki tujuan untuk melindungi dan mencegah dari penyusupan ataupun pengendalian terhadap sistem, data, jaringan maupun program digital yang bersifat vital dari ancaman siber dengan beragam bentuk serangan yang tentunya dilakukan secara illegal. Dengan keberadaan keamanan siber diharapkan membawa rasa aman dan dapat meminimalisir potensi ancaman serangan siber yang akan datang. Oleh karena itu Indonesia menginisiasi pembentukan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (Id-SIRTII) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai bentuk upaya Indonesia untuk memperkuat keamanan siber Indonesia.

Kawasan Asia Pacific (APAC) merupakan kawasan strategis yang sering menjadi target serangan siber, pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang signifikan mendorong penggunaan teknologi informasi semakin tinggi, dari hal tersebut muncul berbagai kerentanan dalam sistem keamanan siber di Asia Pacific. Beberapa kasus serangan siber yang terjadi di berbagai negara di Asia Pacific menjadi suatu kewaspadaan bersama dalam tingkat regional atau kawasan. Oleh karena itu penting bagi negara di Asia Pacific untuk bersatu dalam meningkatkan keamanan siber dan melakukan kerjasama dalam keamanan siber mulai dari perlindungan infrastruktur sistem, teknologi informasi, komunikasi, dan

informasi yang rentan dari serangan siber yang berpotensi membahayakan pada tingkat nasional maupun regional.

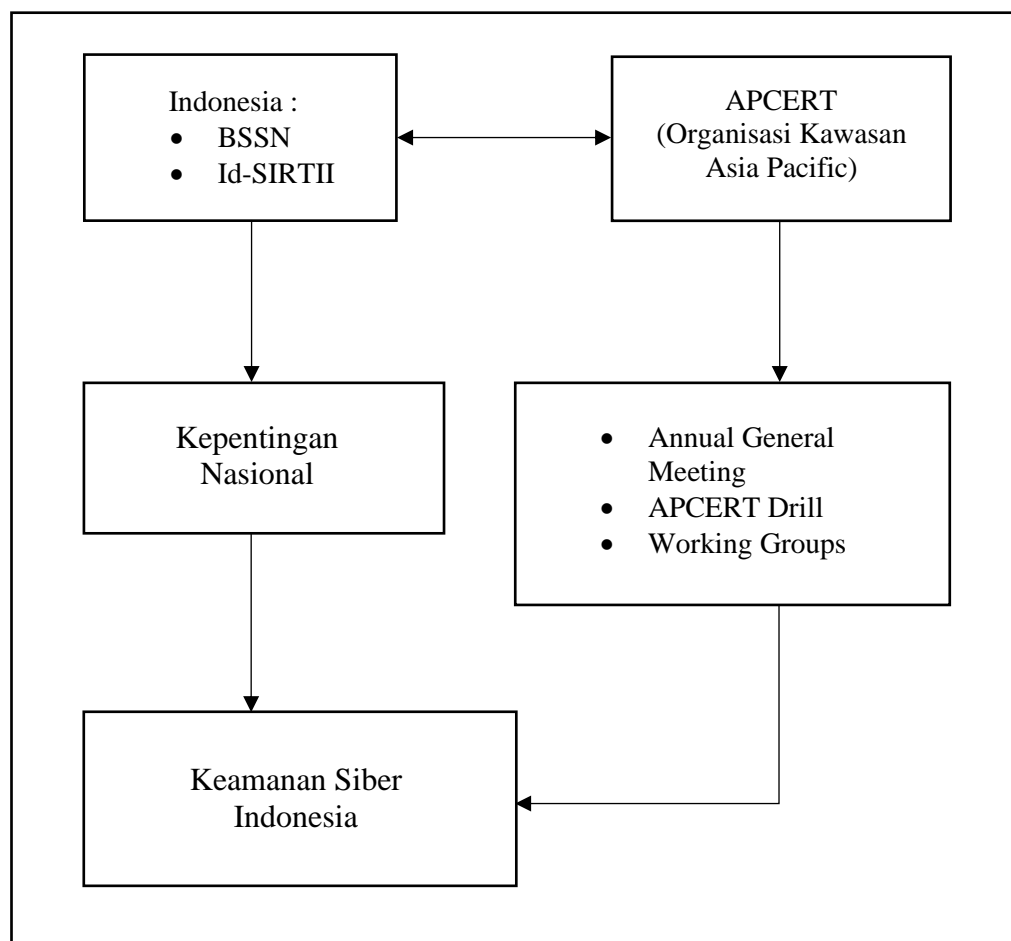
Kemudian negara-negara yang berada di Kawasan Asia Pacific menginisiasi pembentukan Asia Pacific Computer Emergency Response Team (APCERT) sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan keamanan siber di Kawasan Asia Pacific dan sebagai forum koordinasi dalam merumuskan strategi penanganan insiden ancaman siber di kawasan ini. Asia Pacific Computer Emergency Response Team (APCERT), sebagai wadah bagi Computer Emergency Response Team atau Computer Security Incident Response Team (CERT/CSIRT) di kawasan Asia Pasifik, secara rutin mengadakan rapat umum tahunan (Annual General Meeting). Pertemuan ini bertujuan untuk mempertemukan para pimpinan CERT/CSIRT anggota sebagai forum koordinasi dalam merumuskan strategi penanganan insiden keamanan siber di kawasan ini. Dan strategi tersebut akan dibawa untuk di implementasikan pada keamanan siber masing-masing negara anggota. Indonesia merupakan salah satu negara anggota sekaligus pendiri Asia Pacific Computer Emergency Response Team (APCERT). dan menjadi negara kepulauan terbesar di Asia Pacific yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang sangat strategis baik dalam potensi ekonomi, politik dan keamanan.

Indonesia juga tidak luput dari berbagai serangan siber yang merugikan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah. Hal ini menjadi urgensi bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan siber nya untuk memastikan kepentingan nasionalnya dapat terjamin stabilitasnya.



Maka dari itu kerjasama Indonesia dengan Asia Pacific Computer Emergency Response Team (APCERT) turut menjadi prioritas utama Indonesia dalam membangun keamanan siber. Hal ini bisa menjadi indikasi tentang bagaimana pengaruh kerjasama Indonesia dengan Asia Pacific Computer Emergency Response Team (APCERT) terhadap keamanan siber Indonesia dalam kurun waktu 2020-2023.

Berikut dibawah ini merupakan gambaran atas penjelasan rancangan dari kerangka pemikiran di atas.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran